

Menjaga Kedaulatan Pangan

Safeguarding Food Sovereignty

Posman Sibuea

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Medan
email:sibueaposman@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has a variety of local foods as sources of carbohydrates and vast ocean as a source of fish protein, but this nation's hobby of importing food cannot be stopped. Food estate development policies in a number of regions, which are considered to be able to overcome the food deficit, are still full of pros and cons. These projects would cut trees in protected forests, which in turn would increase the rate of deforestation and the loss of biodiversity, as well as threatening smallholder farming systems. The food crisis problem seems to have nothing to do with the conscious culture of local food consumption. It is as if dependence on imported food products has nothing to do with upholding food sovereignty and resilience which is built on the pillars of a food culture based on local wisdom which has existed for centuries in Indonesian culture. As a concept of fulfilling the right to food for the people, food sovereignty provides this basic need with good and culturally appropriate nutritional quality, produced using a local agricultural system that is sustainable and environmentally friendly. This existence must be returned when the world experiences a global food crisis

Keywords : *nutrition, crisis, food*

ABSTRAK

Indonesia memiliki beragam pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dan lautan yang luas sebagai sumber protein ikani namun hobbi bangsa ini mengimpor pangan belum bisa diputus. Kebijakan pengembangan food estate di sejumlah daerah yang dianggap bisa mengatasi defisit pangan masih sarat pro dan kontra. Ia cenderung membuka hutan lindung yang pada gilirannya meningkatkan laju deforestasi, kepunahan keanekaragaman hayati dan mengancam sistem pertanian rakyat. Masalah krisis pangan seolah-olah tidak ada kaitannya dengan budaya sadar konsumsi pangan lokal. Seolah-olah ketergantungan pada produk pangan impor tidak ada hubungannya dengan menegakkan kemandirian kedaulatan pangan yang dibangun pada pilar budaya pangan berbasis kearifan lokal yang telah eksis berabad-abad lamanya dalam budaya bangsa Indonesia. Sebagai sebuah konsep pemenuhan hak atas pangan bagi rakyat, kedaulatan

pangan menyediakan kebutuhan dasar ini dengan kualitas gizi yang baik dan sesuai budaya, diproduksi dengan sistem pertanian lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Eksistensi inilah yang harus dikembalikan ketika dunia mengalami krisis pangan global.

Kata kunci: gizi, krisis, pangan

PENDAHULUAN

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas) menyampaikan empat skenario yang akan terjadi pada tahun 2045, saat itu Indonesia merayakan kemerdekaan ke-100 tahun dan masyarakatnya didominasi generasi milenial. Skenario yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo bukan prediksi, ramalan atau khayalan. Skenario yang disusun menggunakan orientasi transformatif ini berdasarkan wawancara sejumlah tokoh dan narasumber lintas profesi di tengah bangsa ini tentang pandangan mereka mengenai Indonesia di tahun 2045.

Empat skenario itu ialah mata air, sungai, kepulauan dan air terjun. Lemhanas tidak punya preferensi skenario mana yang akan terjadi, tetapi semuanya butuh antisipasi. Kemampuan imajinasi manusia membayangkan situasi dan kondisi 30 tahun ke depan tidak mudah. Banyak faktor yang memengaruhi dan menentukan masa depan. Jumlah cadangan energi fosil berkurang yang akan berdampak pada kian rapuhnya kedaulatan energi. Lahan pertanian tak kunjung bertambah yang sewaktu-waktu dapat memantik krisis pangan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang akan mencapai 350 juta jiwa pada 2045 (Sangkot, 2015).

Pada skenario mata air, yang terjadi ialah Indonesia diisi oleh generasi baru (milenial) yang mempunyai pandangan berbeda dengan generasi pendahulunya. Generasi milenial akan mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menggunakan prinsip integrasi fungsional yaitu daerah-daerah yang bergabung dalam NKRI mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan jika mereka berdiri sebagai negara sendiri. Mereka sangat menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial serta terbiasa untuk mengeluarkan pendapat yang mengkritik bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan.

Dalam skenario sungai, yang terjadi ialah Indonesia telah mampu keluar dari negara gagal. Jumlah kelas menengah sudah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin maupun konglomerat. Kemitraan antara sektor besar, menengah, dan kecil berjalan lebih baik. Namun permasalahan ekonomi yang berdampak kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial serta korupsi, masih menjadi tantangan yang cukup besar.

Sementara itu di skenario kepulauan yang terjadi ialah Republik Indonesia tetap eksis di tengah peradaban modern dunia sebagai bangsa multi etnis, multi kultur dan bangsa yang pluralis dengan kadar nasionalisme yang tipis. Pada saat itu, Indonesia disibukkan dengan pengamanan poros maritim dunia dan eksplorasi bawah laut yang dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan ekonomi.

Adapun skenario air terjun ialah Indonesia sudah mulai dengan perencanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon dan mengadaptasi pemanfaatan ruang berdasarkan penataan ruang wilayah yang baik. Pemerintah secara bertahap mencoba

meninggalkan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan pada keuntungan jangka pendek dan lebih mencoba cara-cara yang ramah lingkungan. Namun pada saat itu, Indonesia akan mengalami defisit pangan. Krisis pangan itu akan menimbulkan terjadinya letupan-letupan di berbagai daerah. Diharapkan, letupan tersebut dapat dimitigasi karena kedaulatan pangan dijadikan fokus utama dalam mengelola ketahanan pangan misalnya melalui pola pengembangan usaha petani dalam bentuk struktur yang lebih sesuai.

Pesimisme sekaligus optimisme tergambar pada pada keempat skenario tersebut. Digambarkan, akibat krisis energi dapat mendorong terjadinya krisis kebutuhan pokok seperti bahan pangan. Krisis pangan mengingatkan kita pada kejadian tahun 1998 yang memaksa Presiden Soeharto turun dari singgasana kekuasaannya karena rakyat di seluruh daerah di Tanah Air berdemonstrasi secara anarkis sambil meneriakkan turunkan harga sembako (Sibuea, 2000)

Kondisi Indonesia 2045 sangat tergantung pada apa yang dibuat bangsa ini sekarang. Kita menyaksikan, misalnya, bagaimana budaya pangan lokal telah dikhianati. Dalam iklan siaran televisi, hampir selalu diisi dengan produk pangan impor, sementara jika ada warga yang mengonsumsi singkong disebut orang miskin dan terbelakang. Hal ini telah melecehkan mereka yang tinggal di desa yang tak bisa mengakses pizza dan sekaligus melemahkan nasionalisme pangan.

Nasionalisme memudar

Pertambahan jumlah penduduk yang kian pesat menjadikan Indonesia menduduki urutan keempat terbesar di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, Indonesia membutuhkan bahan pangan

dalam jumlah yang amat besar. Indonesia menjadi pangsa pasar pangan yang amat potensial bagi negara-negara penghasil komoditas yang berurusan dengan perut ini. Meski harga pangan makin mahal, tidak secara otomatis mendongkrak kesejahteraan petani. Sebaliknya kemiskinan kian melilit hidup dan kehidupan petani pangan. Dampaknya, pembangunan pertanian di negeri agraris ini dari tahun ke tahun semakin membuat hati miris (Sibuea, 2021).

Sektor pertanian semakin kehilangan sumber daya manusia yang andal. Jumlah pemuda lulusan perguruan tinggi – dari generasi milenial – kian menjauhi sektor pertanian tanaman pangan karena dianggap sumber kemiskinan baru. Beras, daging, jagung, gula dan kedelai – lima bahan pangan strategis di Indonesia – yang ketersediaannya harus dapat dipenuhi setiap waktu mendorong pemerintah membuka kran impor. Kepiawaian negara maju mengelola pangan kini mengalahkan Indonesia sebagai negara agraris yang dikenal subur dan makmur. Indonesia kini terjebak dalam sistem pangan impor yang amat mahal.

Meskipun negeri ini dipuja subur dan makmur, sekitar 75 persen dari kebutuhan pangan dipenuhi dari impor. Sekedar menyebut contoh, tahun 2013, alokasi anggaran untuk mengimpor pangan mencapai Rp 435 triliun. Sepuluh tahun ke depan, jika tidak ada perbaikan dalam pembangunan pertanian pangan – alokasi dana untuk mengimpor pangan diprediksi akan melonjak menjadi Rp 1.500 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan bisa digunakan untuk membangun pabrik pupuk, bendungan, pusat penelitian perbenihan tanaman pangan dan industri hilir pertanian yang muaranya memberi kesejahteraan kepada petani lokal. Jika *tren* impor pangan itu tetap dipelihara, implikasinya akan memperburuk kredibilitas Indonesia di mata dunia sebagai negara agraris. Pemerintah

dinilai tak mampu membangun kedaulatan pangan (*food sovereignty*) di tengah sumber daya pertanian dan pangan lokal nonberas yang melimpah. Kedaulatan pangan ialah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal di tengah sistem pertanian global yang dipengaruhi keuntungan dan subsidi (Latham, 2021).

Hampir semua pasar baik tradisional maupun modern diisi dengan pangan impor. Kita semakin asing dengan makanan nusantara karena opini rasa di lidah sudah terpatritasi rasa roti berbahan gandum. Semangat untuk mengonsumsi pangan berbasis singkong dan ubi jalar semakin luntur karena dianggap sebagai makanan orang miskin dan inferior. Nasionalisme pangan pada 2045 diduga kian memudar. Fenomena ini sudah tampak gejalanya. Ada dinamika dalam anak muda Indonesia. Persoalan kepemudaan tenggelam dalam isu besar yang mewarnai kehidupan politik negeri ini. Jajak pendapat *Kompas*, 28 Oktober 2013 menunjukkan, dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya, 73,6 persen responden memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan butir Pancasila. Jajak pendapat itu juga merekam bagaimana ingatan makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mulai pudar. Responden kelompok ini bahkan kesulitan menyebutkan Sumpah Pemuda. Hanya 9,4 persen responden yang menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan benar.

Faktor generasi milenial dan rasa nasionalisme yang dimiliki menjadi amat penting untuk membangun kembali kedaulatan pangan. Boleh jadi gagasan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya menyatakan tentang perlunya menyajikan menu pangan lokal saat acara rapat di seluruh kantor pemerintah menjadi relevan untuk membangkitkan nasionalisme pangan. Dalam skenario kepulauan dengan mempertimbangkan aspek geopolitik sebagai faktor utama untuk menyusun narasi

tentang Indonesia 2045, mengingatkan kita berpikir ulang dan menyadari sejarah terbentuknya bangsa, letak dan kondisi geografi, demografi, dan perkembangan global. Pemimpin dengan karakter kebangsaan yang tangguh dan memahami visi bangsa untuk membangun kedaulatan pangan sangat dibutuhkan saat ini.

Seiring dengan itu, Badan Pangan Nasional (2022) dalam Sibuea (2023) kembali menggelorakan kedaulatan pangan melalui gerakan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dalam setiap kegiatan baik di kantor maupun acara sosial lainnya dengan menyajikan produk pangan olahan. Kampanye “*Kenyang tidak harus makan nasi*” dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk mengembalikan kedaulatan pangan. Implikasi dari kebijakan ini membawa banyak manfaat. Salah satunya ialah petani didorong untuk memperbaiki usaha taninya supaya masyarakat lebih nyaman dan nikmat mengonsumsi pangan lokal. Bahkan pangan lokal berbahan dasar singkong, ubi jalar, sorgum, pisang di tangan generasi milenial dapat diolah bukan sekedar olahan pangan namun meramunya lebih mewah dan fungsional bagi kesehatan sehingga pantas disajikan di acara-acara resmi kenegaraan.

Tak pelak lagi singkong rebus kekinian diharapkan akan masuk istana negara saat rapat kabinet. Sebuah langkah maju untuk menjadi contoh ketimbang anjuran dalam pidato. Jika para pejabat mulai mengadopsi gaya hidup sederhana, langkah ini akan mengedukasi masyarakat untuk menjauhi pola hidup boros dengan mengonsumsi pangan impor yang terkesan mewah. Posisi singkong dan pangan lokal lainnya tidak lagi menjadi makanan inferior. Tetapi kastanya akan terkontrol menjadi sama dengan produk pangan olahan gandum asal Amerika dan Eropa seperti Donut, Hot Dog, Hamburger, Pizza dan sebagainya.

Ke depan singkong tidak lagi dianggap sebagai lambang kemiskinan. Anjuran pemerintah agar para pejabat mulai makan ubi rebus, selain meningkatkan martabat singkong sebagai pendamping makanan pokok beras juga mendorong petani mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang.

Selama ini singkong atau ubi kayu pada awalnya banyak tumbuh liar di hutan-hutan Amerika Selatan kemudian dibawa bangsa Portugis ke Maluku pada abad ke-16 kelasnya selalu dipandang lebih rendah dari beras sebagai bahan pangan pokok karena kandungan proteinnya yang relatif minim.

Singkong yang sudah lama dikenal masyarakat dalam berbagai bentuk makanan olahan, reputasinya selalu negatif di mata sebagian pakar ekonomi karena dianggap sebagai simbol kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan bangsa. Di Flores Timur ubi kayu kering kerap direbus dan dicampur kelapa parut atau ditumbuk menjadi tepung dan dikukus. Mereka menyebutnya Ubi Kuko. Masyarakat Batak Toba memiliki budaya makan lokal untuk menyiasati mahalanya beras di masa penjajahan Belanda. Mengonsumsi ubi singkong rebus sebagai makanan "pembuka" menjadi pilihan yang amat populer saat itu. Pola konsumsi ini dikenal "*manggadong*" untuk menyebut mengonsumsi ubi rebus sebelum makan nasi (Sibuea, 2011).

Sayangnya, berbagai budaya makan lokal yang dimiliki setiap daerah dan sudah dikenal sejak berabad-abad silam secara perlahan mulai terpinggirkan karena pesatnya perkembangan korporasi pangan global memproduksi pangan olahan berbasis gandum. Keterlibatan korporasi transnasional dalam industri pangan telah menghabisi budaya makan berbasis kearifan lokal. Dengan penguasaan ilmu dan teknologi pangan, korporasi dapat

memproduksi dan mengatur sistem distribusi pangan. Harga pun mereka atur sedemikainya. Struktur oligopoli bermain dalam ruang bisnis pangan yang menetas bentuk penjajahan baru bernama *food capitalism* (Friedmann, 2005).

Pemahaman baru

Himbauan pemerintah agar semua instansi pemerintahan menyediakan singkong rebus saat rapat memberi pemahaman baru tentang ketahanan pangan. Selain mengembalikan martabat singkong sebagai pangan lokal potensial dan menjadi spirit baru bagi para petani lokal karena hasil keringat mereka dihargai pemimpinnya, juga menjadi momen kebangkitan nasionalisme pangan.

Sebagai kebutuhan dasar, pangan senantiasa harus tersedia secara beragam, bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi (UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan). Namun belakangan ini, ketersediaan pangan lokal mulai tergerus dan Indonesia makin tergantung dengan pangan impor. Devisa negara pada tahun 2014 terkuras sekitar Rp 135 triliun untuk mengimpor berbagai bahan pangan, mulai dari garam, beras, daging, kedelai hingga gula.

Bahan pangan dapat dijadikan sebagai kekuatan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Banyak kalangan berpendapat bahwa pangan sesungguhnya identik dengan senjata (*food is the weapon*). Bagi sebuah bangsa yang sangat menggantungkan diri pada pangan impor, ia bak negara jajahan oleh negara-negara maju (Tujan, 2007)

Kini, ancaman krisis pangan menjadi bayang-bayang menakutkan bagi sebagian bangsa, termasuk Indonesia. Harga pangan menjadi bola liar yang kian sulit dikendalikan membuat setiap negara berupaya menyelamatkan kepentingan dalam negeri dan membatasi ekspor.

Fenomena ini perlu disikapi secara baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk memantapkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Mengonsumsi produk pangan lokal berarti melepas ketergantungan impor dan keluar dari jebakan pangan asing (Sibuea, 2016).

Sumberdaya Manusia

Dari keempat skenario yang akan terjadi pada tahun 2045, terlepas skenario apa yang bakal terjadi, akan membutuhkan sumber daya manusia bermutu tinggi yang paham tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tinggi, bukan sekadar iptek biasa-biasa lagi. Umumnya perkembangan teknologi itu disambut penuh sukacita karena diharapkan akan membawa kemajuan dan perbaikan kesejahteraan hidup umat manusia. Seperti halnya penemuan mesin uap yang mendorong terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Yang menjadi penghela yang kuat untuk mengembangkan berbagai perubahan tidak saja dalam cara orang bekerja, melainkan juga gaya hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Mesin uap dipasang pada lokomotif, kapal dan mesin-mesin pabrik yang berdampak luas terhadap sistem pengangkutan darat dan laut. Ia juga berperan besar dalam proses industri yang memberi peningkatan produksi secara bermakna jika disandingkan dengan yang dapat dilakukan sebelumnya lewat tenaga manusia, atau kencir air atau angin.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat. Seperti yang

dinyatakan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".

Teknologi modern cenderung mempercepat tempo kehidupan. Sekedar menyebut contoh perkembangan teknologi transportasi seakan memperpendak jarak dua tempat yang selama ini ditempuh dengan waktu yang relatif lebih lama. Penemuan teknologi komunikasi memberi akses yang lebih mudah dan cepat untuk pengiriman berita bak secepat kilatan cahaya. Penemuan teknologi android yang disandingkan dengan telepon genggam memungkinkan penggunaanya mengirimkan foto dan video secara cepat lewat whatsapp (WA).

Perkembangan dunia digital saat ini merupakan revolusi industri keempat. Pada era ini, teknologi didemokratisasi, dapat diakses semua orang, setidaknya dalam bentuk telepon pintar yang makin canggih. Masyarakat seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, menyambut era baru di bidang teknologi komunikasi ini dengan sukacita yang penuh euforia. Sebagian besar mampu mengakses kemajuan teknologi ini karena memiliki daya beli yang lebih baik sebelumnya. Media massa melaporkan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelas menengah baru. Bahkan pernah disebut bahwa jumlah kelas menengah sudah mencapai 43 persen dari total penduduk Indonesia.

Ini memberi gambaran setidaknya sudah ada 100 juta jiwa penduduk Indonesia mampu meraih penghasilan 2-20 dollar AS per kapita per hari. Bahkan para pengamat ekonomi menyebutkan perkiraanya, jika pertumbuhan ekonomi terus terkontrol secara baik, diperkirakan akan bertambah sekitar 8 juta kelas menengah baru setiap tahun. Mereka adalah orang yang beruntung lolos dari penjara kemiskinan yang memasung

ratusan juta warga miskin lainnya karena berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari.

Namun, yang lebih menakjubkan ialah kegemaran kelas menengah Indonesia mengonsumsi barang impor. Entah karena merasa baru merdeka dari koloni kemelaratan menahun atau ingin pamer kepemilikan materi, libido konsumtif kita begitu menggelora. Ketika barang konsumsi teranyar dilempar ke pasar, seketika itu pula diserbu untuk dibeli. Banyak pengamat mengatakan, kelas menengah Indonesia adalah penggila produk asing, mulai dari makanan, produk pakaian, barang elektronik, sampai otomotif.

Sekedar menyebut contoh kita terkesima ketika melihat penggundulan hutan seluas 2 juta hektar setiap tahun untuk kebutuhan industri kertas, mebel kayu indah, dan perluasan perkebunan sawit. Dampaknya masyarakat sekitar hutan mengalami krisis air, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, untuk kebutuhan pertanian dan gagal panen kerap terjadi. Perluasan perkebunan kelapa sawit di sejumlah daerah telah mengancam perwujudan kedaulatan pangan (Sibuea, 2015b).

Korporasi bermodal besar dengan izin yang sah dari pemerintah dapat menebang pohon semaunya untuk mengambil kayu demi keuntungan pribadi. Keseimbangan alam pun terganggu. Penyakit baru kian sering muncul karena udara dan air tercemar limbah industri. Tragedi Minamata di Jepang dapat disebut sebagai contoh dampak ketidakpedulian manusia pada keseimbangan alam yang menetas penderitaan. Romantisme yang disuguhkan hutan dan riak air mengalir di sungai kawasan hutan dalam waktu yang tidak lama lagi “bisa jadi” hanya tinggal kenangan (Sibuea, 2015a).

Inti persoalannya ialah masyarakat diperhadapkan pada kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan kemajuan

kebudayaan kita. Kita tidak mampu secara kreatif menata kembali hubungan dan struktur sosial, politik dan ekonomi nasional. Kita mengalami perapuhan (*decay*) nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi mesin pendorong kian berkembangnya perilaku yang korup di tengah masyarakat, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kelompok dan kepentingan bangsa. Yang bermuara pada kian dalamnya ketimpangan dan gap sosial, ekonomi, hukum dan memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru (Sen, 1981).

Kebudayaan

Untuk mencari solusi atas masalah degradasi lingkungan di seputar DT, ada baiknya kita urai lebih jauh pengertian kebudayaan. Merujuk pada pemikiran Koentjaraningrat atau sejarawan Inggris, Arnold Toynbee (1889 – 1975) bahwa kebudayaan memiliki ratusan definisi, yang menekankan pada usaha manusia untuk bertahan dan memuliakan kehidupan. Dengan akalunya, manusia terus-menerus menemukan, mengolah, dan mengembangkan berbagai hal untuk kepentingan hidupnya.

Kebudayaan merupakan gambaran identitas, proses berpikir, dan mental manusia. Semua itu terus bergeser seiring pergerakan kehidupan manusia. Tabiat kebudayaan adalah hasratnya untuk berproses menjadi. Itu bukanlah sesuatu yang seluruhnya utuh dan matang, melainkan mengandung berbagai pertentangan, pertandingan, dan belum tersimpulkan.

Manusia telah melahirkan berbagai produk kebudayaan, baik yang *tangible* (bendawi) maupun *intangible* (nonbendawi), seperti tradisi, ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan teknologi. Kebudayaan tumbuh dengan unsur-unsurnya, mulai dari nilai (prinsip yang diakui sekelompok manusia),

norma (sekumpulan nilai yang diterima komunitas), moralitas (konsensus atas baik-buruk), etika (panduan moral dalam tatanan pikiran masyarakat), sampai estetika (kemampuan mengapresiasi produk komunitas lain).

Dengan berbagai anasirnya itu, kebudayaan memiliki sifat dinamis, selalu beradaptasi dengan perubahan. Kebudayaan adalah kata kerja yang meniscayakan ada proses terbuka, interaktif, dan tak pernah berakhir. Kebudayaan menghajatkan ruang dan waktu untuk berkembang demi memuliakan kehidupan manusia (Tranggono, 2014).

Jadi jika sebagian orang menyebut bahwa globalisasi menjadi pemicu maraknya degradasi kebudayaan di Indonesia dan dipandang membawa berbagai dampak negatif terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Indonesia, baik fisik maupun nonfisik, sehingga memerlukan terapi dan upaya pencegahan dan penanganan komprehensif, sinergis, dan taktis. Tepatkah alasan yang menyalahkan globalisasi itu?

Globalisasi sulit didefinisikan. Secara sederhana, globalisasi dapat dikatakan sebagai proses mendunia. Berbagai literatur menyebut globalisasi sebagai proses kian terkoneksi, tergantung, bahkan terintegrasinya antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Ada pergerakan modal, usaha, orang, arus informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang melintasi batas negara dan kawasan.

Adanya arus informasi dari negeri lain yang disalurkan media sosial, televisi, dan media massa lainnya hanya merupakan salah satu aspek dari globalisasi. Inilah yang kerap dipandang sebagai penyebab penurunan nilai-nilai sehingga generasi milenial di negeri ini tidak lagi berpegang kepada nilai-nilai dan kearifan lokalnya. Padahal, kasusnya tidak sesederhana itu.

Ambil contoh makanan khas Batak arsik, berbahan baku “ihan”, dahulu masih mudah ditemukan saat upacara adat karena populasi bahan bakunya berlimpah di Danau Toba. Namun, saat ini populasi “ihan” (ikan batak) kian langka di Danau Toba, Sumatera Utara, karena kondisi air yang tercemar dan penangkapan yang terus berlangsung, sementara perkembangbiakannya di alam menurun. Padahal, ihan memiliki nilai tersendiri dalam upacara adat Batak (Sibuea, 2014a dan Sibuea, 2022).

Ihan batak dalam bahasa latin disebut *Neolissochilus thienemanni*, populasinya kian sulit ditemukan. Kini, para perempuan Batak – sebagian besar – tidak bisa lagi membuat makanan tradisional arsik dari ihan karena bahan dasarnya sudah langka di lokasi (*bona pasogit*). Pada dasarnya, selain bahan utamanya ihan juga digunakan sejumlah bahan tambahan bumbu-bumbu tradisional batak seperti andaliman, mobe dan sotul. Ihan dan berbagai bumbunya diolah sedemikian rupa dengan bantuan alat-alat dan teknik memasak yang sangat sederhana serta didukung oleh pengetahuan teknokulinologi yang terbatas. Pada masa lampau, berbagai bumbu batak disediakan alam sekitarnya di hutan. Mereka harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mendapatkan tumbuhan *andaliman* yang hidup di lantai-lantai hutan. Tidak pernah ada pemikiran untuk membudidayakan, misalnya, dari pemerintah. Setelah ada keprihatinan kemungkinan akan punahnya berbagai tanaman andaliman dan mobe, barulah mulai ada usaha mempertahankan kelestarian tanaman itu.

Lantas, apakah ancaman kian langkanya populasi ihan dan sulitnya mendapatkan rempah andaliman karena semata nilai-nilai globalisasi sehingga sebagian masyarakat Batak tidak bisa menikmati lagi betapa enakness arsik ihan? Ancaman kepunahan ihan dan langkanya

tanaman andaliman itu lebih karena air Danau Toba kian tercemar dan hutan di sekitar Danau Toba berubah menjadi perkebunan monokultur. Pemiliknya tidak hanya perusahaan multinasional, tetapi juga perusahaan modal asing (Sibuea, 2014b; Sibuea, 2021).

Pertimbangan lainnya, berbagai hal yang mendunia mulai dari gagasan atau ide hingga sesuatu yang bisa dilahap, ambil contoh produk pangan seperti disebut sebelumnya, pada dasarnya memiliki sumber kekuasaan dan kepentingan yakni ekonomi. Ayam goreng berlabel barat dan produk roti yang mendunia dengan gerai di mana-mana, episentrum kekuasaannya pada aspek ekonomi. Ini merupakan kekuatan yang sulit dilawan jika kearifan lokal semakin tidak kita rawat keberadaannya di tengah bangsa.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan berpotensi terancam dampak perubahan iklim, pemenuhan pangan menjadi syarat pertama kelangsungan bangsa ke depan. Pengembalian kedaulatan pangan menjadi sebuah keniscayaan guna mendorong semangat solidaritas untuk membawa masyarakat keluar dari krisis pangan yang tengah mengancam mutu sumber daya manusia. Indonesia pun akan semakin mampu mengontrol indeks pembangunan manusia yang selama 10 tahun terakhir mengalami pelambatan.

Untuk itu, politik pangan harus disterilkan dari kendali kelompok pemilik modal, yang memiliki akses dan lobi kuat kepada pemerintah dan legislatif. Pada awalnya mereka masuk di perdagangan. Untuk memastikan terjaminnya pasokan pangan, mereka juga bermain di produksi. Guna meningkatkan volume produksi, mereka menguasai teknologi benih yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan

petani lokal kepada korporat. Langkah selanjutnya, mereka mengendalikan industri pengolahan melalui akuisisi perusahaan nasional. Untuk menjamin produk mereka terjual, perusahaannya juga masuk ke ritel. Kini, petani diseluruh tanah air, makin bergantung pada industri pertanian dan pedagang pangan global yang mementingkan keuntungan.

Pemerintah harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi yang diperdagangkan. Pangan ialah kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap orang. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak hidup manusia. Hak atas pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan sebuah kepastian yang harus diberikan negara kepada rakyatnya lewat pembangunan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan pertanian memberi keniscayaan mengembalikan kedaulatan pangan menjadi rumah kesejahteraan bagi petani lokal. Di tangan generasi milenial, kedaulatan pangan akan bangkit kembali menghadang perdagangan pangan global yang acap dibungkus dalam bingkai ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan kelompok elite politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. Laporan Sensus Pertanian 2013. Jakarta.
- Friedmann, H, 2005. From Colonialism to Green Capitalism: Social Movements and Emergence of Food Regimes. *New Directions in the Sociology of Global Development* (eds. Buttel, F. and McMichael, P.). Oxford: Elsevier.

- Koentjaraningrat, 2000. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latham, J. 2021. The Myth of a Food Crisis. In: *Rethinking Food and Agriculture: New Ways Forward*. Edited by Amir Kassam, Laila Kassam. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, 2021. Pages 93-111.
- Lubis, Mochtar. 1985. Dampak Teknologi pada Kebudayaan. Dalam: *Teknologi dan Dampak Kebudayaan*, Mangunwijaya, YB. Yayasan Obor Indonesia.
- Lucas, Robert E., Jr. 2002. *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sangkot Marzuki, 2015. Indonesia 2045 and The Role of Science Journalists. *Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jakarta.
- Sen, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford, Clarendon Press.
- Shiva, V. 1994. *Bioteknologi dan Lingkungan, dalam Perspektif Hubungan Utara Selatan*. Gramedia Pustakan Utama. Jakarta.
- Shiva, V. 2014. Benih dan Kedaulatan Pangan. *Warta KEHATI*, Agustus. Jakarta.
- Sibuea, P. 2000. Gizi Buruk sebagai Pelanggaran HAM. *Opini Kompas*, 25 Januari, Jakarta.
- Sibuea, 2011. Krisis Pangan dan Manggadong. *Opini Kontan*, 16 Oktober. Jakarta.
- Sibuea, 2014a. Danau Toba yang Terluka perlu Pemulihan. *Opini SatuHarapan.com*. Jakarta
- Sibuea, 2014b. Bola Liar Kabut Asap. *Opini Kompas*, 14 Maret, Jakarta.
- Sibuea, 2015a. Festival Danau Toba dan Krisis Lingkungan. *Opini Suara Pembaruan*, 5 Juni, Jakarta
- Sibuea, 2015b. Ekspansi Sawit Ancam Kedaulatan Pangan. *Opini Suara Pembaruan*, 16 Oktober, Jakarta
- Sibuea, 2016. Nasionalisme dan Kedaulatan Pangan. *Opini SatuHarapan.com*. Jakarta.
- Sibuea, 2021. Menyelamatkan Pangan Lokal. *Opini Kompas*, 16 Oktober. Jakarta.
- Sibuea, 2022. Merdeka dari Kelaparan. *Opini Kompas*, 16 Agustus, Jakarta.
- Sibuea, 2023. Menagih Janji Kedaulatan Pangan. *Opini Kompas*, 16 Oktober. Jakarta.
- Sibuea, 2024. Menata Kembali Sistem Pangan. *Kontan*, 13 Januari, Jakarta.
- Sukarno, 1953. *Almanak Pertanian 1953*. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Djakarta.
- Tranggono, I. 2014. Budaya Kewirausahaan. *Opini Kompas*. 16 Juni, Jakarta
- Tujan A, 2007. *Modul Tentang Kedaulatan Pangan*. Jutaprint, Penang.Malaysia.